

**IMPLEMENTASI PROGRAM *TRADE SUPPORT PROGRAM* (TSP) DALAM
HUBUNGAN KERJASAMA PERDAGANGAN INDONESIA DAN
UNI EROPA TAHUN 2010-2014**

Oleh:

Niki Yuliana

Email: nikiyuliana94@yahoo.com

Pembimbing Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describe the implementations of trade support program in trade cooperations between Indonesia European Union in 2010-2014. Nowadays European Union are one of regions that have big potensial market for Indonesia. But since have a cooperation with European Union, eport product from Indonesia always get a protection from European Union. In order that government of Indonesia has implemented a trade supprot program to increase a quality and quantity of export product from Indonesia.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the implementations of trade support program in trade cooperations between Indonesia European Union. The theories applied in this research are liberalism perspective with international cooperation theory.

The conclusion of the research about the implementations of trade support program in trade cooperations between Indonesia European Union are have done because protection policy of European Union toward export product from Indonesia. Some trade protection European Union are weakness of standarization of product, weakness of competitiveness product from another state, instability of politic and security dosemtic, the high of quality standart from European Union and the policy of tariff and trade from European Union.

Key words: *implementation, trade, support and program.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisis mengenai kebijakan implementasi program *Trade Support Program* (TSP) dalam kerjasama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa tahun 2010-2014. Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.¹

Trade Support Program adalah sebuah kebijakan Pemerintah Indonesia dibidang ekonomi politik internasional yang bertujuan untuk mendukung produktivitas ekspor dari produk Indonesia ke Uni Eropa

melalui peningkatan kualitas mutu barang ekspor. *Trade Support Program* (TSP) sudah dilakukan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini. Tahun 2005 *Trade Support Program* periode II dan pada tahun 2010 Pemerintah Indonesia kembali menerapkan *Trade Support Program* periode ke II yang diambil untuk mendorong integrasi Indonesia pada sistem perdagangan internasional.²

TSP I dan diimplementasikan dari 2005-2008 fokus pada penguatan kapasitas *government agencies* yang terlibat pada hubungan perdagangan antara UE-Indonesia. Fokus program TSP II adalah peningkatan kualitas ekspor Indonesia untuk memastikan pemenuhan kualifikasi standar internasional. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu memaksimalkan fungsi *Quality Infrastructure* (QI) yang dapat memastikan bahwa proses dan produk yang diekspor dari Indonesia sesuai dengan standar yang berlaku internasional dan meningkatkan *traceability*.³

¹ Diakses dari <http://www.kompas.com>. *Arah Politik dan Ekonomi Indonesia*. Pada tanggal 5 Januari 2013

² Heryawan, O. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia – Eropa Melalui Kerangka ASEM. Jurnal Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Nomor 2 Vol 3 Tahun 2013.

³ Ardie, Tonny A., *Dampak Strategis Ekonomi Pasca Perluasan Keanggotaan Uni Eropa*. Jurnal Bappenas. Nomor 1 Volume 3. Tahun 2012.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah tahun 2011-2015. Tahun 2015 dipilih karena pada saat itu merupakan pelaksanaan program ini. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan

merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif liberalisme, dimana dalam perspektif ini yang menjadi tujuan utama dari hubungan perdagangan adalah efisiensi untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi dan interaksi ekonomi yang dijalankan. Perspektif ini bermanfaat untuk memahami fenomena disetiap negara atau pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan daya saing nasional dan kekuatannya untuk mendapatkan keuntungan yang ditawarkan oleh pasar internasional atau global.⁴

Untuk membangun negara bangsa yang kuat untuk memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi sehingga negara harus melibatkan diri secara aktif untuk mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuasaan negara. Oleh sebab itu untuk mempertahankan perekonomiannya supaya tetap kuat

⁴ Aleksius jemadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu. Hal 225

maka harus melakukan hubungan ekonomi melalui surplus perdagangan dengan membatasi impor dan menggalakkan ekspor sebanyak-banyaknya. Hubungan dapat disimpulkan bersifat *zero sum game* (konflik bukan bersifat harmonis). Menurut **Thomas Mun** dalam bukunya mengemukakan bahwa: "*The ordinary means therefore to encrease our wealth and treasure is by foreign trade, wherein we must ever observe this rule: to sell more to yearly than we consume of their in value...because that that part of the stock which is not returned to us in wares must necessarily brought home in treasure.*"⁵

Penelitian ini memfokuskan kepada implementasi program *Trade Support Program* (TSP) dalam hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa. Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara bangsa. Tingkat analisa ini, penelaahannya difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri, oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Di tingkat ini asumsinya adalah semua pembuat

keputusan, dimana pun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Dengan demikian, analisa harus ditekankan pada perilaku negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara bangsa.⁶

Kemudian dalam penelitian juga dibutuhkan teori untuk menganalisis suatu kasus. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa fenomena itu terjadi.⁷ Dalam penelitian juga dibutuhkan pemaparan jelas tentang konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Berangkat dari uraian di atas, kerangka dasar teoritik yang akan dipergunakan dalam permasalahan ini adalah teori kerjasama internasional. Dalam penelitian ini, penulis mengenai implementasi program *Trade Support Program* (TSP) dalam hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa, maka peneliti menggunakan Teori Kerjasama Internasional, karena Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam

⁵ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm 18

⁶*Ibid.* hal 41

⁷*Ibid.* hal 219.

bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut. Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.⁸

Kerjasama internasional dapat terwujud atas dasar kepentingan yang

sama dan bekerja atas prinsip saling menguntungkan. Pelaksanaan kerjasama ini didahului dengan tindakan-tindakan yang disalurkan melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional perlu bagi setiap negara. Pada dasarnya tujuan suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak terdapat dalam negeri. Untuk itu negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan antar negara⁹. Dalam melakukan kerjasama internasional, sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu:

1. Adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat, tanpa adanya penghargaan, tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula.
2. Adanya keputusan bersama dalam mengatasi persoalan yang timbul. untuk mencapai

⁸T. May rudy. 2002. *Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, hlm.27

⁹ Syamsur Dam, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal 15

keputusan bersama diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan, bahkan komunikasi dan konsultasi lebih penting dibandingkan dengan komitmen yang biasanya hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Dengan kata lain frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari komitmen¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan kerja sama bilateral Indonesia dan Uni Eropa telah dirintis sejak 1967 dibawah kerangka ASEAN ketika Uni Eropa masih berbentuk masyarakat Uni Eropa (*European Economic Community*).¹¹ Perkembangan hubungan antar kedua pihak tidak terlepas dari latar belakang dinamika baik di Uni Eropa maupun di Indonesia. Di satu pihak, perkembangan Uni Eropa selalu disebutkan oleh kegiatan perluasan Uni Eropa sejak 1957 hingga tercapainya Uni Eropa yang menyatukan seluruh negara di Eropa, juga perkembangan situasi keamanan global yang menjadi fokus perhatian berasama negara-negara di Eropa.

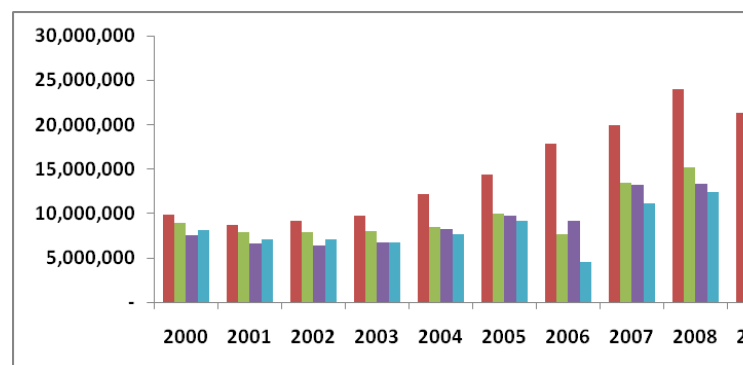
¹⁰*Ibid.* hal 16

¹¹<http://www.deplu.go.id/Pages/IfpDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=15&P=Regional&l=id>

Hubungan kerjasama bidang ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa yang dilihat dari tiga bidang utama, yakni perdagangan, investasi dan program bantuan /utang luar negeri. Uni Eropa merupakan salah satu kekuatan ekonomi di dunia yang memiliki hubungan perdagangan erat dengan Indonesia. Data dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) menunjukkan bahwa hingga tahun 2010 Uni Eropa secara konsisten merupakan kawasan tujuan ekspor Indonesia peringkat kedua, di bawah ekspor ke negara-negara ASEAN, dan lebih tinggi dibandingkan ekspor Indonesia ke Jepang dan Amerika Serikat, dua partner penting lainnya dalam bidang perdagangan. Berikut ini merupakan grafik kerjasama Indonesia dan Uni Eropa, yaitu sebagai berikut:

Grafik 1.1 Grafik Kerjasama

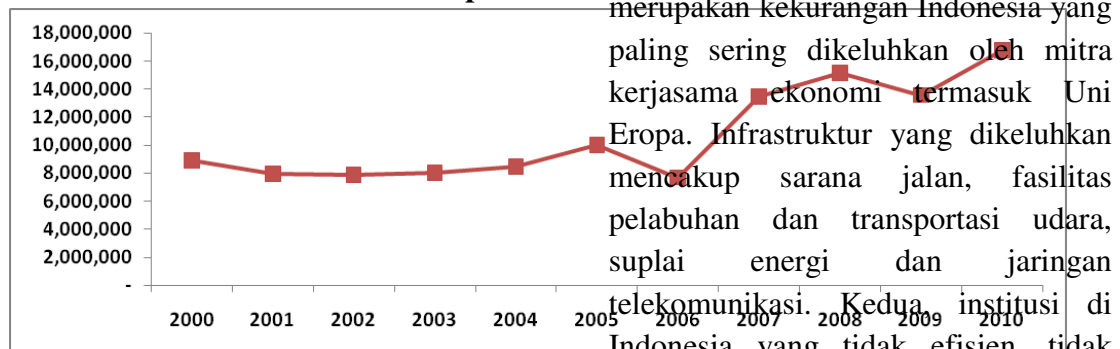
Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa



Sumber: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Tahun 2015

Berdasarkan data grafik diatas, maka tidak terjadi perubahan yang substansial pada paruh pertama dekade 2000an dan sempat mengalami penurunan di tahun 2006, ekspor Indonesia ke Uni Eropa meningkat relatif tajam pada tahun 2007, yakni sekitar 75%. Ekspor ke Uni Eropa, sebagaimana ekspor ke negara lain, mengalami penurunan pada tahun 2009 sebagai dampak dari krisis global, namun kembali meningkat di tahun 2010. Fluktuasi perkembangan investasi ekonomi Indonesia dan Uni Eropa dapat dilihat dari perkembangan grafik berikut ini, yaitu:

Tabel 2.2 Fluktuasi Hubungan Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa



Sumber: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Tahun 2015.

Oleh karena itu, apabila dilihat dari jenis barang, ekspor Indonesia ke

negara-negara Uni Eropa terutama didominasi oleh produk pertanian, bahan bakar dan mineral, tekstil, serta barang-barang manufaktur. Hal ini dikarenakan Uni Eropa merupakan partner investasi yang penting bagi Indonesia. Apabila dilihat secara rata-rata dari tahun 2005 hingga tahun 2010, posisi negara-negara Uni Eropa sebagai sumber FDI berada di urutan kedua, setelah Singapura.

Besarnya pasar Indonesia ini juga diikuti daya beli yang makin besar dari kelas menengah yang makin berkembang. Namun demikian, Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan yang menghambat hubungan ekonomi dengan negara lain, termasuk Uni Eropa. Pertama, infrastruktur yang buruk dan tidak menunjang kegiatan ekonomi merupakan kekurangan Indonesia yang paling sering dikeluhkan oleh mitra kerjasama ekonomi termasuk Uni Eropa. Infrastruktur yang dikeluhkan mencakup sarana jalan, fasilitas pelabuhan dan transportasi udara, suplai energi dan jaringan telekomunikasi. Kedua, institusi di Indonesia yang tidak efisien, tidak transparan dan masih kuatnya budaya dan praktek korupsi menjadi hambatan yang menakutkan bagi mitra kerjasama ekonomi.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa (EU) tidak cukup berkembang walaupun sudah terhubung melalui kerangka kerjasama *Association of the Southeast Asian Nations* (ASEAN) dengan mitra dialogue sejak tahun 1980 dan *Asia-Europe Meeting* (ASEM) sejak tahun 1996. Kedua negara kurang memanfaatkan peluang-peluang kerjasama ekonomi. Upaya peningkatan hubungan kedua pihak muncul dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan menguatnya perekonomian negara-negara Asia Timur; Laporan Bank Dunia tahun 2008 menunjukkan bahwa sepuluh tahun setelah krisis ekonomi Asia negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur Laut berkembang lebih kuat ketimbang kondisi sebelum krisis.

Momentum inilah yang ingin dimanfaatkan Indonesia dan Uni Eropa untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation* (PCA) pada bulan November 2009. Selanjutnya kajian bersama tahun 2010-2011 menghasilkan *Report of the EU-Indonesia Vision Group on Trade and Investment Relations* yang dilaporkan tanggal 28 Juni 2011 merekomendasikan Uni Eropa dan Indonesia untuk segera

memulai negosiasi menuju *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Sasaran-sasaran berkelanjutan (*sustainability*) juga perlu dipertimbangkan pengembangan fasilitas dan fasilitas perdagangan. Oleh karena itu fokus program *trade support* Indonesia dan Uni Eropa ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Belanja Negara untuk Perbaikan Infrastruktur

Salah satu yang menjadi kendala dalam perdagangan baik antara Indonesia dengan Uni Eropa maupun dengan mitra dagang lainnya adalah buruknya infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur yang kurang memadai akan meningkatkan biaya logistik dan mengurangi efisiensi secara keseluruhan. Di samping itu, lemahnya infrastruktur di Indonesia juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mengatasi hambatan ini, rekomendasi untuk arah kebijakan Kementerian Keuangan adalah untuk meningkatkan belanja negara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia. Selain itu, tingginya minat investor Uni Eropa pada pengadaan infrastruktur di Indonesia dapat dilihat sebagai peluang bagi Indonesia untuk mendanai kebutuhan infrastrukturnya. Bersama dengan

instansi terkait lainnya, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan dan kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi investor Uni Eropa yang ingin melakukan investasi pada pengadaan infrastruktur di Indonesia.

2. Keringanan pajak dengan pertimbangan yang sangat ketat

Untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia-Uni Eropa, maka perlu dipertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak ini bagi investor yang berinvestasi pada industri perikanan, pertanian, barang elektronik, furnitur dan kosmetik. Dengan keringanan pajak pendapatan investasi ini, diharapkan akan meningkatkan investasi pada sektor-sektor tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Akan tetapi peneliti menyarankan agar pemberian kebijakan keringanan pembayaran pajak ini secara cermat dan ketat, misalnya dilihat dari perhitungan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, jumlah penyerapan tenaga kerja, omset yang mereka peroleh dan penilaian strategis lainnya.

3. Pemberian *Tax Holiday* dengan Pertimbangan yang Cermat dan Ketat

Pemberian tax holiday bagi industri yang baru muncul atau pelaku

usaha yang menjadi pionir pada industrinya. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan stimulus bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi kegiatan usaha pada sektor-sektor yang dianggap akan dapat memberikan eksternalitas positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Industri yang direkomendasikan mendapatkan tax holiday ini adalah industri yang melakukan inovasi yang mempertimbangkan ‘elemen hijau’ (*green economics*). Hal ini didasarkan pada besarnya perhatian Uni Eropa pada isu *green economic* sehingga inovasi dengan mempertimbangkan ‘elemen hijau’ ini dapat membuka kesempatan peningkatan ekspor Indonesia ke Uni Eropa.

4. Pengelolaan Utang Publik

Kebijakan pengelolaan utang publik ini perlu dilakukan untuk meningkatkan investment grade surat-surat berharga Indonesia. Dengan naiknya peringkat surat utang pemerintah Indonesia diharapkan akan memberikan sinyal positif bagi dunia internasional mengenai potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga akan menarik minat investor asing, termasuk investor Uni Eropa untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

5. Pendampingan/pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengekspor produknya ke negara-negara di Eropa secara berkelanjutan

Pendampingan/pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengekspor produknya ke negara-negara di Eropa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dapat berupa pelatihan - pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan pihak-pihak dari Uni Eropa agar produk-produk Indonesia dapat berkompetisi di pasar Eropa. Untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia-Uni Eropa, maka perlu dipertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak ini bagi investor yang berinvestasi pada industri perikanan, pertanian, barang elektronik, furnitur dan kosmetik. Dengan keringanan pajak ini, diharapkan akan meningkatkan investasi pada sektor-sektor tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas ekspor Indonesia ke Uni Eropa.

Namun demikian, kebijakan pemberian keringanan pajak ini harus dilakukan secara cermat dan ketat, misalnya, dilihat dari perhitungan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut,

jumlah penyerapan tenaga kerja, omset dan penilaian strategis lainnya. Oleh karena itu target penerapan *Trade supprot program* antara Uni Eropa dan Indonesia jilid II tahun 2012 adalah sebagai berikut: Persaingan dagang di tingkat internasional sangat berat. Hal ini disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan perdagangan di setiap negara. Untuk itu perlu adanya kerja sama ekonomi. Sehingga dalam kerja sama tersebut perlu dibuat aturan perdagangan yang menguntungkan negara-negara anggotanya. Dengan demikian adanya aturan tersebut dapat memperlancar kegiatan ekspor dan impor dan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Akibatnya posisi perdagangan dalam negeri semakin kuat. Pemberian *tax holiday* bagi industri yang baru muncul atau pelaku usaha yang menjadi pionir pada industrinya. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan stimulus bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi kegiatan usaha pada sektor-sektor yang dianggap akan dapat memberikan eksternalitas positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi

program *Trade Support Program* (TSP) dalam hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa dilakukan karena adanya hambatan perdagangan yang dilakukan oleh Uni Eropa serta semakin meningkatnya kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia ke Uni Eropa. Beberapa bentuk hambatan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa adalah berupa produk ekspor dari Indonesia mengalami hambatan perdagangan dibidang standarisasi produk yang lemah, lemahnya daya saing industri dalam negeri terhadap produk dari negara lain, stabilitas keamanan yang tidak stabil di Indonesia serta kebijakan non tarif dari Uni Eropa serta tinggi kualitas mutu impor dari Uni Eropa. Dengan adanya hambatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa serta melihat potensi perdagangan yang didapatkan oleh Indonesia ketika melakukan kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa, maka Pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 melakukan beberapa terobosan kebijakan. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah program *Trade Support Program*.

Implementasi program *Trade Support Program* (TSP) dalam hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa dilakukan

sejak tahun 2004- 2008 dimana Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program *Trade Support Program* (TSP) I guna meningkatkan kualitas perdagangan. Selain itu, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan program *Trade Support Program* II (TSP) terutama terkait *quality infrastructure* terhadap kualitas produk Indonesia dan Pembentukan perjanjian bilateral yang ambisius seperti *EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) guna meningkatkan potensi hubungan perdagangan diantara kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Buku

Aleksius jemadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu.

Ardie, Tonny A., *Dampak Strategis Ekonomi Pasca Perluasan Keanggotaan Uni Eropa*. Jurnal Bappenas. Nomor 1 Volume 3. Tahun 2012.

Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

Heryawan, O. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia – Eropa Melalui Kerangka ASEM. Jurnal Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Nomor 2 Vol 3 Tahun 2013.

Syamsur Dam, 1996. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

T. May rudy. 2002. *Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama.

Website

<http://www.kompas.com>. *Arah Politik dan Ekonomi Indonesia*. Pada tanggal 5 Januari 2013

<http://www.deplu.go.id/Pages/IfpDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=15&P=Regional&l=id>